

Heru Budi Temui Erick Thohir, Bahas Integrasi Transportasi

JAKARTA (IM) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir untuk membahas percepatan pembangunan integrasi transportasi publik.

"Hari ini sudah dijadwalkan dan meminta waktu kepada Pak Menteri BUMN bahwa sudah berdiskusi satu jam lebih," kata Heru kepada wartawan di lobby Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (19/10).

Dalam pertemuan tersebut, Heru dan Erick membahas berbagai hal yang tidak hanya soal integrasi transportasi publik.

"Berbagai hal dan tentunya saya sebagai Pj Gubernur meminta arahan dan mensinergikan apa yang bisa kami lakukan untuk masyarakat, untuk transportasi dengan Kementerian BUMN," ujarnya.

Namun, ia belum bisa mendetailkan pembicaraannya bersama Erick Thohir.

"Tentunya, belum bisa kami sampaikan satu-satu di sini, kami detailkan dulu. Saya akan sering bertemu dengan Bapak (Erick) dengan asisten Bapak untuk mensinergikan," ujarnya.

Sementara itu, Erick mengatakan, sesuai arahan Presiden, Pemerintah Pusat maupun Daerah melakukan sinkronisasi transportasi milik BUMN. "Inilah salah satunya Pak Heru hadir di sini untuk memastikan dan meningkatkan kerjasama yang sudah terjadi antara pemerintah DKI dan tentu kami BUMN," ujarnya.

Untuk mempercepat pembangunan integrasi transportasi, kata Erick, Heru Budi akan bertemu Menteri Perhubungan. "Insya Allah, Pak Heru besok ke Pak Menhub dan kami sudah sinkronisasi bagaimana pelayanan publik transportasi ini bisa maksimal," kata dia.

Sebab, ujar Erick, tidak mungkin pemerintah bergantung pada kendaraan umum atau swasta. ● yan

Monas Diubah Desainnya agar Hijau Kembali Usai Direvitalisasi Era Anies

JAKARTA (IM) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sepakat untuk mengubah desain kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, usai direvitalisasi di era Anies Baswedan.

Kesepakatan itu muncul usai Erick Thohir bertemu Heru di Gedung Kementerian BUMN, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/10).

"Nanti Pak Heru yang akan desain bersama Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno) dan bisa hijau kembali. Hijainya ini jangan tanggung," kata Erick kepada awak media di Gedung Kementerian BUMN.

Erick menambahkan, kawasan Monas akan dibikin hijau seperti kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat.

"Kompleks GBK bagus enggak? Bagus dong. Nah ini yang ingin kami terapkan," ujar Erick.

Sementara itu, Heru akan berkoordinasi dengan Mensesneg Pratikno selaku ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka. Terlebih, kawasan Monas merupakan aset milik pemerintah pusat yang dikelola oleh Pemer-

intah Provinsi DKI Jakarta. "Ya, nanti dibahas ya," kata Heru.

Adapun revitalisasi sisi selatan kawasan Monas oleh Pemprov DKI Jakarta dimulai pada 2019 atau era Anies. Tepatnya pada November 2019, setelah penandatanganan kontrak Pemprov DKI Jakarta dengan pemenang lelang PT Bahana Prima Nusantara, proyek itu dimulai.

Anggaran untuk revitalisasi sudah disusun pada 2018 dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APDB) DKI Jakarta tahun 2019.

Pemprov DKI saat itu menyatakan, revitalisasi sisi selatan Monas menjadi plaza merupakan cara mengembalikan Monas ke desain awal saat baru dibangun.

Menurut Pemprov DKI, tidak seharusnya pelataran sisi selatan Monas ditanami pohon. Itulah sebabnya, dalam perjalanan revitalisasi, pohon yang puluhan tahun sudah tertanam di sisi selatan Monas tercabut.

Sebanyak 205 pohon di sisi selatan Monas saat itu ditebang untuk membangun plaza. Pemprov DKI berjanji untuk mengganti pohon yang ditebang menjadi tiga kali lipat. ● yan

Akses Warga Tertutup Tembok SMK 69, Disdik DKI: Akan Difasilitasi Kelurahan

JAKARTA (IM) - Akses rumah warga di Jakarta Timur terhalang tembok SMKN 69. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tidak mengabaikan permohonan warga untuk menjebol tembok itu. Namun, kelurahan setempat dinyatakan Disdik DKI bakal memfasilitasi permohonan warga.

Lokasi akses warga yang terhalang tembok SMKN 69 Jakarta ada di permukiman Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Merespons aduan warga setempat, Disdik DKI sudah menyampaikan jawaban via surat bernomor e-1129/PK.05 ditujukan untuk salah satu warga yang aksesnya terhalang yakni Bresman Marboen, beralamat di Jl Swadaya Rawabadung, RT11/RW07.

"Permohonan warga terkait akses menuju jalan utama akan difasilitasi oleh Kelurahan Jatinegara melalui musrenbang (musyawarah rencana pembangunan)," demikian bunyi poin nomor empat surat itu, sebagaimana dikonfirmasi Pelaksana tugas (Plt) Sub Koordinator urusan Humas Kerja Sama Antarlembaga Disdik DKI, Horale Tua Simanullang, Selasa (18/10).

Horale menjelaskan, persoalan tembok itu sudah jelas yakni tembok itu dibangun untuk melindungi sekolah. Ini sudah sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta tahun 2016 tentang Pengananan Aset Milik Pemprov DKI.

"Permohonan Saudara Bresman Marboen tidak dapat dipenuhi karena pemagaran halaman sekolah merupakan pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan demi kenyamanan dan ketertiban pelaksanaan PBM (Proses Belajar Mengajar)," demikian bunyi keterangan Disdik DKI, disampaikan Horale.

Sebelumnya warga bernama Bresman Marboen memohon agar Disdik DKI membuka akses warga yang selama ini terhalang tembok SMKN 69.

Tembok itu mulai dibangun pada 2019, namun kemudian menutup sempurna di depan rumah seorang warga bernama Bresman Marboen pada 14 April lalu. Bresman mengatakan ini bukan hanya akses ke rumahnya saja melainkan juga warga lain di RT tersebut. Selain ke Disdik DKI, dia juga sudah mengadakan masalah akses warga ini ke DPRD DKI. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANT



REVITALISASI HALTE TRANSJAKARTA

Pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek revitalisasi Halte Transjakarta SMK 57 di Jakarta, Rabu (19/10). PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menargetkan sebanyak 46 halte selesai direvitalisasi hingga akhir 2022.

Ratusan Pekerja Demo ke Kantor Gubernur, Minta Pelabuhan KCN Dibuka Kembali

Kami datang kemari untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan kepada Bapak Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur agar Pelabuhan KCN Marunda dibuka kembali. Kami menderita karena tidak bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami," ujar Fudiyanto Kamin, Koordinator Pengguna Jasa Pelabuhan.

JAKARTA (IM) - Sekitar 400-an pekerja korban penutupan Pelabuhan KCN Marunda, Jakarta Utara, berunjuk rasa sekaligus menyampaikan pengaduan di kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (19/10).

Mereka mendesak Penjabat (Pj) Gubernur, Heru Budi

Hartono membuka kembali Pelabuhan KCN yang ditutup oleh Dinas Lingkungan hingga menyebabkan ribuan orang menjadi pengangguran.

Dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, perwakilan para demonstran melakukan orasi secara bergantian. Mereka mengukap sangat

pelabuhan ini.

Kebutuhan hidup, mulai biaya sekolah anak, kontrakan, makan, dan lainnya tidak mampu dipenuhi karena mereka kini menjadi pengangguran.

"Kami datang kemari untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan kepada Bapak Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur agar Pelabuhan KCN Marunda dibuka kembali. Kami menderita karena tidak bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami," ujar Fudiyanto Kamin, Koordinator Pengguna Jasa Pelabuhan (Penjaspel), pada wartawan di lokasi unjuk rasa.

Menurutnya, tindakan Dinas Lingkungan Hidup yang menutup sepihak Pelabuhan KCN tidak memikirkan nasib para pekerja. "Semoga dengan aksi damai ini dapat segera diambil langkah solusi oleh

Pemrov DKI untuk kembali membuka pelabuhan," katanya.

Dalam kesempatan itu, pihak Pemrov DKI Jakarta memberikan respons dengan menerima sejumlah perwakilan pendemo. Mereka pun menampung keluhan dan berjanji menindaklanjuti tuntutan dari para pengunjung rasa. "Kami dari perwakilan pengunjung rasa diterima oleh Kepala Kesbangpol DKI Bapak Taufan Bakri. Beliau berjanji akan menindaklanjuti masalah penutupan pelabuhan ini dan menyampaikan kepada Pj Gubernur Bapak Heru Budi Hartono," kata Fudiyanto.

Seperti diketahui, ribuan orang menganggur akibat pencabutan izin lingkungan bongkar muat terminal pelabuhan Karya Citra Nusantara (KCN), Jakarta Utara, sejak Juni 2022.

Demikian disampaikan oleh Koordinator pengguna jasa pelabuhan (Penjaspel) Munif. "Kami sebagai usaha

pelayaran, truk, buruh bongkar muat, usaha penyewaan alat berat, sangat terdampak. Bahkan sekarang sudah banyak pegawai yang kami rumahkan karena sudah tidak sanggup bayar honor lagi. Antrean kapal juga terjadi, bahkan ada yang sampai menunggu sandar 15 hari," ujar Munif.

Munif menuturkan, KCN telah memenuhi hampir seluruh syarat administratif dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun sampai saat ini pencabutan usaha tersebut masih berlaku. "Namun, setelah sekarang persyaratan dipenuhi, dan sudah 95%, karena hanya kurang tembok, kenapa (DLH) masih saja tidak memberi izin kembali supaya terminal KCN bisa operasi," kata Munif.

Dia mengukap heran dengan masalah ini. "KCN itu perusahaan yang sahamnya dimiliki juga oleh Pemda DKI Jakarta (lewat KBN). Kenapa Dinas LH sampai mencabut izin, bukan membinaanya?" katanya. ● yan

PROTES IZIN PEMBANGUNAN 3 LANTAI DIBANGUN 6 LANTAI Warga Sunter Agung Adukan Tetangganya ke Balai Kota

JAKARTA (IM) - Ferry Wirya Teja, Warga Sunter Agung, Jakarta Utara, melaporkan tetangganya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui posko pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (19/10). Ia membuat laporan karena tetangganya diduga melanggar pembangunan bangunan.

"(Melapor ke Pemprov DKI) masalah pelanggaran bangunan. Dia (tetangganya) izin (membangun) tiga lantai menjadi enam lantai," tutur Ferry di Balai Kota DKI, Rabu (19/10).

Sementara itu, kata dia, kediamannya kini memiliki lima lantai. Tiga lantai teratas berbentuk railing. Ferry merasa privasinya terganggu lantaran ketinggian tetangganya yang lebih tinggi. Selain itu, kata dia, sang tetangga juga kerap membuang sampah ke arah kediamannya. "Jadi suka buangin botol sampah. Pernah dibuangin batu bata ke saya di lantai lima. Dia tahu saya bekerja

dengan batu bata. Kalau kena orang kan bisa mati," urainya.

Ferry menambahkan, sebelum membuat pengaduan di Balai Kota DKI pada Rabu ini, dia pernah melaporkan soal pembangunan kediaman tetangganya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP1TSP) Provinsi DKI Jakarta. Namun, ia menyebut bahwa laporan itu tak kunjung ditindaklanjuti oleh DPMP1TSP DKI.

Karenanya, Ferry memutuskan untuk mengadu langsung ke Balai Kota setelah mengetahui Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono membuka kembali posko aduan.

Ia membawa 31 berkas berisikan dokumentasi foto serta berkas pelengkap lain sebagai bahan aduan ke Pemprov DKI. Pj Gubernur Heru Budi menyempatkan diri memantau posko pengaduan masyarakat di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Rabu pagi. Tiba di pendopo itu sekitar pukul 08.01 WIB, Heru langsung

mendatangi satu per satu meja yang ada di posko itu. Adapun meja pengaduan itu dibagi berdasarkan lima wilayah administrasi di DKI Jakarta.

Rabu pagi, Heru juga menyempatkan diri untuk mengobrol dengan para pelapor.

Heru sebelumnya mengukap sengaja menerapkan kembali sistem pengaduan masyarakat secara langsung di Balai Kota DKI Jakarta, yang sempat diterapkan era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pada penerapannya, pengaduan warga itu akan berlangsung pada Senin-Kamis dan dibuka mulai pukul 07.30 WIB sampai 08.30 WIB.

Pihak yang akan menerima pengaduan itu berasal dari lima pemerintahan kota administratif di DKI Jakarta. Pihak asisten Sekretaris Daerah (Setda) DKI Jakarta yang akan mengatur pihak penerima pengaduan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendiskusikannya. ● yan

FOTO: ANT



FESTIVAL PECINTA KUDA INDONESIA

Peserta melakukan aksi berkuda kategori dressage pada Indonesian Horse Lovers Festival di Equinara Katogor Sports, JIEP Pulomas, Jakarta, Rabu (19/10). Komunitas berkuda Indonesia Horse Lovers menggelar Indonesian Horse Lovers Festival pada 19 - 23 Oktober 2022 yang bertujuan memperkenalkan olahraga equestrian ke masyarakat umum sekaligus untuk pembibitan atlet muda.

mandiri
PEMBERITAHUAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Kepada Yth.,
PT. Sarana Tani Jaya/ Sdr. Iwan Sjafir SE (Direktur Utama)
Di tempat

Menunjuk Perjanjian Pengalihan Piutang Bank (Cessie) telah dilakukan dengan Akta Notaris Prima Hedy, SH. Mkn No.187 tanggal 30 September 2022 dan Perjanjian Kredit Jangka Pendek No.PK/016/KUK/92 tanggal 08 Juni 1993 PT. Bank Bumi Daya (Persero) Cabang Jakarta Radio Dalam yang saat ini menjadi PT Bank Mandiri (Persero), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Sesuai catatan administrasi kami, jumlah kewajiban kredit Saudara dengan nomor rekening 101010002565 per tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp. 390.947.000,00 (terbilang tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Sebagai upaya penyelesaian fasilitas kredit Saudara maka pada tanggal 30 September 2022, kami telah melaksanakan pengalihan piutang (Subrogasi) atas fasilitas kredit Saudara berikut dokumen yang berhubungan dengan fasilitas kredit Saudara kepada kreditur baru sbb:
 - Nama : Ferrari Forbes
 - Alamat : Jl. Prima Ujung No. 22 RT. 05 RW. 05 Kel. Tegol Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat

Dengan telah beralihnya piutang tersebut maka setiap dan/atau seluruh piutang atau tagihan kredit Saudara menjadi hak dan milik dari kreditur baru tersebut.

Jakarta, 20 Oktober 2022
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Regional Retail Collection & Recovery Region V

mandiri
PENAWARAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)

Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan penjualan atau pengalihan piutang (Cessie) terhadap debitur sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat Rumah	Jumlah Tagihan per 19 Oktober 2022	Alamat Agunan
1.	PT. Basami Rekyasa	Jl. Tebet Timur Dalam VIII J NO 01 RT 0111 RW 006 Kat. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan	4.428.866.854,77	Jl. Lembah Nyur, Desa Kopo, Kec. Cisarua, Kab. Bogor Jawa Barat. Blok Karang Sari, Desa Pamulihan, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang, Jawa Barat

Apabila ada yang berminat dalam pengalihan kredit debitur di atas dapat menyampaikan penawaran secara tertulis ke alamat dibawah ini paling lambat tanggal 25 Oktober 2022, jam 10.00 WIB.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Retail Collection & Recovery Group
Regional Retail Collection & Recovery Region V
Wisma Mandiri II Lt.17
Jl. Kebon Sirih No.83, Jakarta 10340.
Telp. 30023002 Ext. 7224397, 7129421

Demikian untuk diketahui semua pihak.

Jakarta, 20 Oktober 2022
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Regional Retail Collection & Recovery Region V / Jakarta 3